PEREMPUAN DESA DI TENGAH HIMPITAN KEMISKINAN DAN KETIDAKADILAN GENDER : Pergulatan Perempuan Kemiri dalam Memperebutkan Hak Atas Kesetaraan dan Kelangsungan Hidup Keluarga

M. Khusna Amal
(Dosen dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STAIN Jember, sedang menempuh Program Doktor (S3) Ilmu Sosial di UNAIR Surabaya)
e-mail: izza_jbr@yahoo.com

Abstrak: Tulisan ini hendak menegaskan bahwa dalam pola relasi sosial yang tidak berimbang antara kekuatan dominatif dengan kekuatan subaltern tidak serta merta menciptakan ketergantungan, kepasifan, dan kepasrahan total kelas sosial yang didominasi di bawah kelas sosial yang mendominasi. Fenomena ini sebagaimana ditunjukkan oleh kaum perempuan miskin desa Kemiri yang hidup di sekitar perkebunan. Melalui keterbatasan kuasa (power) yang dimilikinya, kaum perempuan Kemiri tetap aktif membangun dunianya, guna merespon problema kemiskinan dan ketidakadilan gender yang membelenggu kehidupan diri dan keluarganya. Dihadapkan pada penetrasi pasar serta tekanan modernisasi neo-kapitalisme dan negara yang abai terhadap nasib kehidupannya, kaum perempuan dengan keterbatasan dan sekaligus kepiawaian yang dimiliki justru mampu menyusun aneka siasat dan melakukan negosiasi terhadap kekuatan-kekuatan mainstream tersebut. Melalui sumberdaya lokal yang ada di sekitarnya seperti ikatan persaudaraan, kekerabatan, dan solidaritas komunal, serta berbagai aksi kecil-kecilan, mulai dari melancarkan gosip, mengambil (baca: mencuri) hasil bumi perkebunan, mengkapling sebagian lahan perkebunan untuk ditanami, kaum perempuan Kemiri memanfaatkannya sebagai senjata dalam mempertahankan dan sekaligus memperebutkan hak bagi kelangsungan hidup keluarganya. Aneka tindakan subkultur yang direpresentasikan kaum perempuan miskin Kemiri tersebut sekaligus menjadi kritik bahwa penetrasi sistem sosial hegemonik yang dilancarkan kelompok suprastruktur tidak serta merta menjadikan mereka pasif, tidak berdaya, dan bertekuk lutut di bawah sangkar hegemoni kekuatan mainstream, sebagaimana pandangan Gramsci. Saat hidup

menjadi lebih sulit, ruang-ruang kelola menyempit, pilihan-pilihan yang terbatas dan berbagai ketidakberuntungan seolah telah menjelma menjadi suatu keniscayaan, kaum perempuan Kemiri selalu saja mempunyai pilihan-pilihan tak terduga. Mereka hampir selalu berhasil menemukan jalan keluar dalam situasi yang serba sulit, kendatipun hanya bersifat informal, jika bukan ilegal.

Kata kunci: Perempuan, Kesetaraan & Ketidakadilan Gender, Kemiri.

Pendahuluan

Dalam pranata sosial pedesaan yang paternalistik, perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan keniscayaan. Pranata sosial pedesaan yang *gender biased* menciptakan ruang yang tak setara bagi laki-laki dan perempuan. Dalam soal kerja, misalnya, kecenderungan pandangan dikotomis masih kuat di kalangan pedesaan, bahwa hanya kerja yang dilakukan kaum laki-laki yang dianggap sebagai kerja yang sebenarnya. Sedangkan kerja yang dilakukan kaum perempuan tidak pernah diposisikan sebagai kerja yang memiliki nilai sosial-ekonomi setara dengan kerja yang dilakukan kaum laki-laki. Kerja yang dilakukan dalam ranah domestik dimaknai sebagai representasi dari tugas, tanggungjawab dan kewajiban yang dilekatkan pada kodrat perempuan. Di ranah publik, kerja kaum perempuan hanya dianggap sebagai usaha untuk membantu suami, bukan pencari nafkah utama.[1]

---

[1] Persepsi ini muncul karena sistem ekonomi neo-liberalisme yang telah menunggangi pola budaya paternalistik memanfaatkan perempuan sebagai pion utama, yaitu menggaris bawahi bahwa 'perempuan bekerja hanya sekedar membantu, bukan pencari nafkah utama. Lihat: *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, No. 56, 2007, hal. 68. Sistem sosial semacam itu kentara sekali dipengaruhi oleh pandangan yang bersifat dualisme, atau dalam bahasa Levi-Strauss disebut dengan *binary opposition*. Suatu pandangan yang membawa pada konsep pembagian kerja *(division of labor)* berdasarkan jenis kelamin di mana laki-laki ditempatkan pada sektor publik sedangkan perempuan di sektor domestik. Kegiatan ekonomi dinilai pandangan ini sebagai dunia laki-laki dan sebaliknya segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan non-ekonomi dipandang sebagai ranah perempuan. Ini menyebabkan kegiatan yang dilakukan dalam rumah tangga cenderung dipandang sebagai kegiatan non-ekonomi karena pertama itu adalah tugas perempuan sebagai ibu rumah tangga, kedua karena kegiatan rumah tangga itu tidak secara langsung menghasilkan sebuah *outcome* yang dapat diukur dengan jelas seperti ukuran uang. Tugas-tugas rumah tangga seperti memasak, mengasuh anak,

Kenyataan ini menjadi ironis, karena perempuan desa ternyata terlibat aktif dalam ragam kerja di ranah domestik maupun publik. Peran ganda yang dimainkan kaum perempuan desa justru menjadi nilai lebih dibandingkan dengan kerja kaum laki-laki. Mereka tidak saja menjadi ibu rumah tangga, tetapi lebih dari itu juga melakukan kerja-kerja non domestik. Buruh tani, buruh perkebunan, pembantu rumah tangga, kuli bangunan, penari jalanan, penari panggung merupakan sebagian kecil ragam kerja yang bisa dilakukan kaum perempuan. Meski standar upah lebih rendah dibanding laki-laki, mereka tetap melakukannya agar keberlangsungan hidup keluarga terjaga.[2]

Kerja-kerja perempuan tersebut sesungguhnya telah memainkan peran besar dan sekaligus memberikan kontribusi signifikan bagi keberlangsungan hidup keluarganya.[3] Ini karena rata-rata penghasilan suami seringkali jauh dari

---

membersihkan rumah, melakukan kegiatan yang berhubungan dengan reproduksi atau konsumsi dipandang sebagai kegiatan non-ekonomi. Baca Sjafri Sairin, Pujo Semedi dan Bambang Hudayana, *Pengantar Antropologi Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 96-197.

[2] Tidak seperti buruh yang bekerja di pabrik-pabrik atau dunia industri perkotaan yang menawarkan kontrak kerja formal, status buruh perempuan di sektor kerja pedesaan dapat digolongkan ke dalam sistem kerja *casual*, bekerja kalau ada pesanan. Mereka tetap digolongkan sebagai buruh yang bekerja pada sektor informal, mendapat bayaran lebih rendah, walau biasanya memiliki beban besar dari lelaki karena selain bertanggung jawab pada urusan domestik rumah tangga juga diharapkan berkontribusi pada keuangan keluarga. Karena itu ILO *(International Labour Organization)* menyatakan walau sektor informal menjanjikan kesempatan kerja bagi perempuan, tetapi resikonya adalah ketiadaan perlindungan kerja dan upah yang amat rendah. Inilah sebabnya dikatakan bahwa dunia di bawah sistem neo-liberalisme justru menciptakan feminisasi kemiskinan. Lihat: *Jurnal Perempuan*, No. 56, 2007, hal. 63-64.

[3] Pendapat ini turut menegaskan beberapa hasil studi yang menunjukkan bagaimana ibu-ibu rumah tangga memberikan kontribusi penting dalam kehidupan rumah tangganya. Studi tentang buruh perempuan dalam pekerjaan panen *(derep)* di daerah pertanian Yogyakarta, menunjukkan para ibu rumah tangga juga mempunyai peranan penting dalam kehidupan rumah tangganya (Sairin, 1976). Berbagai studi lanjutan tentang konstribusi perempuan bagi ekonomi rumah tangga yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada awal 1990-an juga memberikan gambaran lebih jelas tentang sumbangan perempuan dalam ekonomi rumah tangganya, seperti hasil penelitian yang ditunjukkan oleh Ken Suratiyah dan Sunarru Samsi Hariadi (1990) tentang kegiatan perempuan dalam aktifitas pertanian dan sumbangan hasil kerja itu buat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Lihat Sjafri Sairin dkk., *Pengantar Antropologi Ekonomi*, halaman: 198.

mencukupi, bahkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.[4] Padahal kebutuhan hidup semakin kompleks, mulai dari biaya pendidikan anak, kesehatan keluarga, sandang, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Tak pelak, peran praktis-strategis yang dilakukan perempuan menjadi signifikan dalam menjaga keberlangsungan hidup keluarga. Tanpa harus mengedepankan nyata dalam menopang berbagai kebutuhan hidup keluarga. Tidak seperti perempuan kelas menengah urban yang *nota bene* berpendidikan dan *melek* gender yang cenderung ekspresif dalam mengartikulasikan peran strategisnya, perempuan desa dengan segenap kesederhanaan dan keterbatasannya tetap aktif memainkan perannya dalam menjaga keberlangsungan hidup keluarga, meski kerja atau gerak sosial yang dilakukannya seringkali dilabeli sebagai semata-mata "kewajiban perempuan" atau "pekerjaan pelengkap" dalam rangka membantu suami.

Karena itu, cukup menarik melakukan pengkajian atas gerakan subjektifitas perempuan desa yang terartikulasikan dalam tindakan-tindakan praktis mereka untuk turut serta dalam menjaga keberlangsungan hidup keluarga.[5] Tindakan perempuan miskin di pedesaan sifatnya sangat unik, lokal dan beragam. Keragaman gerak subjektifitas perempuan itu menjadi cara pandang untuk melihat siasat lokalitas yang mereka mainkan.[6]

---

[4] Rata-rata penghasilan keluarga miskin di pedesaan dalam bentuk finansial (baca: upah), sebagaimana terdapat pada keluarga miskin di Kemiri yang menjadi lokus penelitian ini, berkisar antara Rp. 100.000,- sampai Rp. 150.000,-. Kecuali yang migrasi, mereka dapat mengirimkan uang bulanan sebesar Rp. 500.000,-

[5] Cara pandang ini sekaligus digunakan untuk mengkritisi perspektif ideologi gender yang cenderung melihat perempuan sebagai kelompok yang pasif dan terus menerus menjadi korban (viktimisasi). Jadi, seolah-olah segala simbol, nilai, dan tradisi itu sepenuhnya menentukan tindakan anggota masyarakat, padahal dalam kenyataannya banyak yang tidak mendukung berbagai simbol tersebut. Hanya dalam kondisi tertentu mereka menggunakannya sebagai pedoman atau hanya menerima di permukaan saja untuk mencegah konflik. Dengan kata lain, walaupun ada slogan atau nilai yang tampak cukup dominan dalam suatu masyarakat, tidak jarang muncul slogan atau nilai yang menentang atau melawan ideologi dominan tersebut. Ratna Saptari & Brigitte Holzner, *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), 209.

[6] Terkait dengan keragaman subjektifitas perempuan berikut kontestasi yang dimainkan, Anna L. Tsing mengatakan bahwa perempuan dengan keserbaragaman identitas, posisi, dan persilangan hubungan sosial budaya itulah berada di "wilayah perbatasan *(borderland)*" sebuah ruang kritis yang senantiasa menggoyahkan diskursus dominan serta memungkinkan untuk terus

Fokus Kajian

Subjek kajian tulisan ini adalah perempuan miskin di Desa Kemiri, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Terdapat dua isu utama yang ditelaah dalam studi ini, yaitu (1) bagaimana pergulatan (baca: kontestasi) perempuan miskin desa ketika berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial dominatif untuk berebut hak hidup bagi diri dan keluarganya?; dan (2) apakah pergulatan kaum perempuan dengan kemiskinan itu pada gilirannya dapat melahirkan redefinisi pada dirinya untuk memahami pola relasi sosial yang *gender biased*, baik dalam ranah domestik maupun publik, atau justru sebaliknya, menjadikan kaum perempuan semakin kurang peka terhadap pola relasi sosial yang selama ini mensubordinasikannya ?

Metode

Studi ini memakai metode penelitian kualitatif yang bertolak dari paradigma simbolisme. Pola tindakan perempuan desa, tidak semata-mata dimengerti sebagai realitas objektif yang dapat dikuantifisir, tetapi juga harus dimengerti sebagai makna yang terepresentasi dalam berbagai simbol kultural, yang sesungguhnya eksis tidak dalam simbol itu melainkan di alam kesadaran manusia yang tidak seluruhnya termanifestasikan di alam inderawi.[7]

Secara teknis-metodologis, penggalian data dilakukan pertama-tama dengan terjun langsung ke lapangan untuk terlibat dalam aktivitas kelompok sasaran penelitian dalam kehidupan keseharian mereka serta pengamatan *on going*,[8] tidak saja terhadap peristiwa menyangkut tindakan perempuan desa yang terkait langsung

---

melakukan kontestasi. Novi Anoegrajekti, Perempuan Seni dan Siasat Lokal, *Makalah*, hal., 1; lihat juga Anna L. Tsing, *Alien Romance* dalam *Fantasizing the Feminine in Indonesia*, Laurie J. Sears (ed.), (London: Duke University Press, 1996), 311.

[7] Soetandyo Wignjosoebroto, Realitas Sosial Sebagai Objek Kajian, *Makalah* disampaikan dalam Latihan Penelitian Kualitatif Bagi Dosen PTAIS, STAIN, dan PAI pada PTU Se-Kopertais Wilayah IV, (Malang: Lemlit Unisma kerjasama dengan Depag RI, 2000), 3; "Fenomena CQ: Realitas Sosial Sebagai Objek Kajian Ilmu (Sains) Sosial", dalam Burhan Bungin (ed.) *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 20-21.

[8] Sholichin Abdul Wahab, "Tujuan, Strategi, dan Model dalam Penelitian Kualitatif", *Makalah*, disampaikan dalam Latihan Penelitian Kualitatif Bagi Dosen PTAIS, STAIN, dan PAI pada PTU Se-Kopertais Wilayah IV, (Malang: Lemlit Unisma kerjasama dengan Depag RI, 2000).

dengan responnya terhadap kemiskinan, melainkan juga pengamatan atas kondisi kehidupan dan lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang melingkupinya. Proses pengamatan terhadap tindakan dan kondisi kehidupan sosial perempuan miskin pedesaan tersebut melibatkan apa yang disebut "interaksi" secara intensif dan dialogis. Dalam proses interaksi itu peneliti dan komunitas sasaran terlibat aktif dalam dialog. Meski wawancara dilakukan secara tidak terstruktur, peneliti tetap menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan didialogkan dengan informan. Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara menemukan informan primer, yakni perempuan miskin desa yang ditinggal suaminya migrasi, untuk kemudian diperluas berdasarkan informasi yang diperoleh dari informasi primer.

Tahap selanjutnya adalah melakukan refleksi secara kontinyu atas hasil "interaksi" dan "pengamatan *on going*" serta hasil "dialog/wawancara" yang diperoleh di lapangan. Pada tahap ini siklus interaksi, observasi *on going*, dan refleksi-kritis digunakan sebagai teknik penggalian dan pemaknaan atas data yang diperoleh. Dalam proses refleksi inilah analisis data kemudian dikembangkan, pra dan pasca lapangan. Mengingat makna yang terepresentasikan dalam simbol-simbol itu merupakan kualitas yang lebih mudah dipahami secara hermeneutik dan reflektif daripada diukur dari perspektif empirisisme atas indikator-indikator yang manifes saja, maka analisis yang akan digunakan peneliti cenderung lebih banyak berproses melalui cara-cara partisipatif, yaitu cara yang mengharuskan peneliti memikirkan berbagai strategi *how to get in, to get along, and at the end to get out*, yang lebih memungkinkan peneliti memasuki alam simbolisme para pelaku sosial dalam masyarakat yang diteliti.[9]

Kemiri: Desa Kecil yang Terus Bergulat Dengan Kemiskinan

Kemiri hanyalah sebuah desa kecil dengan mayoritas penduduknya berbahasa Madura. Sebagai desa kecil dengan luas wilayah 1620,4 ha, keberadaannya pun kurang begitu dikenal. Namun pada awal tahun 2006, tiba-tiba desa kecil ini menjadi pusat perhatian publik dan media massa baik nasional maupun internasional akibat peristiwa banjir bandang yang menelan korban ratusan jiwa.

---

[9] Sutandyo Wignjosoebroto, "Realitas Sosial Sebagai Objek Kajian" dalam Burhan Bungin (ed.), *Metodologi Penelitian Kualitatif* ...., halaman: 22.

Menilik kondisi alam Kemiri, sebenarnya desa yang berada pada ketinggian 500-700 M di atas permukaan laut ini memiliki kekayaan alam melimpah, khususnya di sektor pertanian dan perkebunan. Namun, hamparan perkebunan yang luas bukanlah milik warga yang dapat digarap guna meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya. Kebanyakan dari warga setempat hanya berperan sebagai pekerja kasar, menjadi buruh perkebunan yang dikelola sepenuhnya oleh sebuah institusi bernama korporasi.[10] Ironis, kondisi ekonomi sebagian besar masyarakat Kemiri justru terpuruk. Tak sulit menemukan rumah berdinding anyaman bambu (bahasa Jawa: *gedhek*), beralaskan batu bata dan bahkan ada yang berlantaikan tanah liat. Jarang sekali rumah warga yang memiliki fasilitas kamar mandi dan WC. Kalaupun ada, kondisinya sangat memprihatinkan, kamar mandi dan WC berupa kakus letaknya berdekatan bahkan nyaris menyatu dengan kandang ternak. Kebutuhan air untuk konsumsi sehari-hari diperoleh dari mata air pegunungan yang kondisinya tidak terlalu jernih.

Sementara itu, sarana penerangan berupa listrik belum bisa dinikmati warga secara leluasa. Untuk memenuhi kebutuhan penerangan, mereka harus menyalur aliran listrik dari tetangga dusun yang sudah terlebih dahulu memperoleh fasilitas penerangan permanen dari PLN. Fasilitas kesehatan seperti posyandu, bidan desa, klinik desa, lembaga pendidikan formal, dan sarana transportasi umum juga belum menjangkau sampai kawasan pedalaman desa. Karenanya, bagi warga yang tidak memiliki kendaraan sendiri, mereka harus berjalan kaki atau naik sepeda *onthel* untuk ke pusat desa, baik untuk keperluan berobat, berjualan dan belanja kebutuhan sehari-hari, mengurus keperluan yang ada *sangkutpaut*-nya dengan birokrasi desa, dan semacamnya. Bagi warga yang tinggal di dusun kawasan pedalaman seperti dusun Danci atas, Keputren dan Sodung yang dekat dengan areal perkebunan, untuk dapat sampai ke pusat desa dengan jalan kaki dibutuhkan waktu tempuh kurang lebih 25 menit.

---

[10] Ada tiga perusahaan atau korporasi yang sekarang ini mengelola area perkebunan di Kemiri, yaitu perusahaan perkebunan milik negara (PTPN), perusahan perkebunan milik daerah (PDP), dan perusahaan perkebunan milik swasta (PT. J.A. Watti). Hasil perkebunan unggulannya antara lain kopi, kakau atau coklat, dan karet. Ketiganya lebih merepresentasikan diri sebagai "korporasi pasar" (kapitalisme) yang lebih tunduk kepada kepentingan para pemilik modal. Sementara hutan di lereng pegunungan Argopuro dikelola oleh instansi negara bernama perhutani. Di samping berfungsi sebagai hutan lindung, hutan kawasan gunung Argopuro ditanami pula beberapa kayu olahan seperti mahoni, sengon, dan sejenisnya.

Penduduk Kemiri yang berjumlah 8426 orang, terdiri atas 3610 laki-laki dan 4816 perempuan, memang tidak semuanya bekerja di sektor perkebunan. Dilihat dari topografi kawasan yang menjadi hunian warga, maka gerak ekonomi warga dapat dibedakan ke dalam beberapa tipologi. Warga yang tinggal di sekitar areal perkebunan, sebagian besar memang bekerja sebagai buruh perkebunan. Warga bagian tengah yang memiliki kondisi alam berupa areal *tegal*, dengan topografi alam yang datar dan agak berbukit, bekerja sebagai petani penggarap *tegal*. Sebagian warga yang tinggal di kawasan dataran rendah seperti dusun Tenggiling, Kantong, dan sebagian Danci, bekerja di sektor pertanian sawah sebagai petani kecil atau dikenal dengan istilah petani *gurem*, petani penggarap, dan buruh tani. Warga yang dekat dengan jalur utama desa dan pasar, banyak yang bekerja di sektor perdagangan, jasa, dan usaha lain di luar pertanian. Meski telah terjadi semacam diferensiasi kerja dalam kehidupan warga masyarakat desa Kemiri, namun secara umum masih terlihat bahwa sebagian besar penduduk, baik di dataran tinggi maupun dataran rendah, banyak yang menggantungkan hidupnya dari sektor pengolahan lahan garap (pertanian, perkebunan, dan *tegalan*). Gerak warga Kemiri berbeda-beda dalam sektor lapangan pekerjaan, namun mereka memiliki sisi persamaan, yakni sama-sama sebagai pekerja di sektor informal yang kurang menjanjikan. Kerja di sektor informal pedesaan hampir tidak memberikan jaminan sosial bagi kelangsungan dan kesejahteraan hidupnya. Mereka juga menghadapi semacam "takdir sosial" yang sama berupa kemiskinan (*poverty*), ketidakberdayaan (*powerless*), marginalisasi, dan penindasan akibat sistem ekonomi politik yang tidak adil.

Dengan latar pendidikan rata-rata tamatan SD dan tidak tamat SD (data lengkap lihat tabel di bawah), hanya sedikit warga Kemiri yang dapat berkiprah di sektor-sektor pekerjaan formal dengan jaminan sosial yang lebih menjanjikan. Dengan modal kekuasaan yang dimilikinya, dan sudah pasti tidak sebesar kekuasaan yang dimiliki kalangan elit maupun kelas menengah terdidik, warga desa senantiasa dihadapkan pada kesulitan untuk dapat mengakses sektor-sektor ekonomi strategis seperti PNS (sekitar 36 orang), anggota TNI/POLRI (pensiunan, 4 orang), pegawai kantoran, BUMN/BUMD (4 orang), perusahaan swasta berpenghasilan tetap, menjadi petani dengan kepemilikan dan penguasaan lahan luas, pedagang atau pengusaha dengan kemampuan modal cukup, serta aparat pemerintah.

Kegagalan sebagian besar warga untuk dapat mengakses lapangan pekerjaan dan kehidupan layak di desanya sendiri telah memaksa mereka untuk melakukan migrasi ke daerah lain guna mencari sumber penghidupan. Dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa sekitar 60–70 % warga miskin yang ada di setiap dusun, satu dari anggota keluarganya ada yang bermigrasi. Daerah tujuan antara lain Kalimantan, Bali, Surabaya, Jakarta, dan Malaysia. Kebanyakan dari mereka yang bermigrasi adalah kaum laki-laki, terutama yang sudah berkeluarga. Fakta bahwa banyak warga dari keluarga miskin di Kemiri melakukan migrasi, meski dapat dipandang sebagai satu pilihan yang rasional (*rational choiche*), dapat dibilang cukup ironis mengingat Kemiri dan daerah Jember pada umumnya dahulu dikenal sebagai daerah favorit tujuan para migran, terutama dari Madura dan Jawa Timur bagian barat atau dikenal Jawa kulonan seperti Blitar, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, dan sebagian daerah Jawa Tengah. Kini kondisinya justru bertolak belakang, Kemiri berubah menjadi desa yang sama sekali tidak menarik minat orang luar untuk dijadikan sasaran migrasi karena potensi ekonominya yang minus. Sebaliknya, Kemiri justru banyak ditinggalkan oleh warganya sendiri dan berpaling ke daerah atau kota lain yang dinilainya lebih eksis secara ekonomi.

Sementara itu, cerita tentang migrasi yang dilakukan keluarga miskin desa Kemiri dalam konteks sekarang ini tidak bisa dipisahkan dari berbagai persoalan. Lahan garap yang minim atau bahkan ketiadaan lahan garap, keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia di desa, tuntutan kebutuhan hidup yang semakin tinggi, dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil, menjadi alasan yang cukup kuat bagi warga Kemiri untuk migrasi. Sekarang ini warga Kemiri hanya memiliki dan menguasai sebidang tanah untuk tempat tinggal (122,5 Ha), tanah kebun (21,7 Ha), tanah tegal (64,5 Ha), dan tanah sawah (331,5 Ha). Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa rata-rata warga yang memiliki lahan garap baik tegalan, sawah maupun perkebunan luasnya berkisar antara 250 s.d 500 M^2. Pemilik lahan 2000 M^2 lebih sedikit dapat dihitung jari yaitu kepala desa yang berasal dari *bengkok*, dan satu dua orang warga saja. Dari wawancara juga terungkap bahwa cukup banyak warga yang sesungguhnya tidak memiliki lahan garap sama sekali, atau nyaris tidak memiliki lahan garap,[11] yang tidak terungkap oleh data statistik.

[11] Petani yang tidak berlahan sering didefinisikan sebagai petani yang memiliki lahan di bawah ukuran pertanian tertentu, yang biasanya adalah kurang dari 0,10 hektar. Lihat Roger

Keterbatasan lahan garap yang dimiliki dan dapat dikelola warga tidak cukup mampu menopang kebutuhan ekonomi keluarga yang rata-rata terdiri atas 5-6 orang, apalagi dengan orientasi anak-anak mereka yang mulai keluar dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat subsistem. Dalam hal ini perkebunan, lahan perkebunan, hutan, lahan kehutanan, pertanian dan lahan pertanian, atau pekerjaan-pekerjaan terkait dengan lahan garap menjadi pilihan yang paling mungkin. Menilik lahan garap pertanian yang bisa dikelola warga, maka melalui skema formal maupun informal perkebunan dan kehutanan yang ada di sekitar desa memainkan peran penting dalam menopang ekonomi masyarakat setempat. Hanya saja, karena alasan keterbatasan, skema informal seperti pencurian kayu, hasil perkebunan, pengkaplingan tanah, perkebunan kecil-kecilan untuk ditanami, terkadang lebih dominan mewarnai gerak ekonomi warga dibandingkan dengan skema formal seperti buruh tanam, buruh tebang, buruh petik kopi, karet dan kakau, dan berbagai relasi ketenagakerjaan lainnya. Situasi semacam ini yang sering luput dari penjelasan angka-angka statistik resmi yang menyangkut gerak ekonomi dan sekaligus politik (mata pencaharian) warga setempat.

Sudah sejak lama sektor perkebunan tidak lagi menjadi tempat bagi penduduk Kemiri dalam menggantungkan gerak ekonominya. Penduduk Kemiri yang berjumlah 8426 orang, dari mereka yang sudah terlibat dalam kerja, gerak ekonominya terdeferensiasi ke dalam berbagai sektor kehidupan antara lain sektor pertanian (menjadi petani kecil, petani penggarap, petani tegal dan buruh tani), sektor perdagangan (pedagang *mlijon*, pedagang *kelontong* di rumah dan pasar), sektor pendidikan (guru, tenaga administrasi sekolah), perkantoran (birokrasi desa), dan sektor-sektor informal lainnya. Keterbatasan kepemilikan lahan garap, area kerja di perkebunan yang terus menyempit, dan sumberdaya alam yang dapat dikelola warga semakin minim, menjadikan sebagian besar penduduk Kemiri hanya mampu memanfaatkan dan/atau mengambil sebagian kecil ruang ekonomi yang ada di desanya. Gerak kerja warga dalam ruang ekonomi yang sangat terbatas inilah yang lantas menjadikan mereka harus berkutat dengan kemiskinan. Migrasi pun lantas menjadi pilihan rasional warga Kemiri untuk dapat memperluas ruang gerak ekonomi ataupun arena kontestasi sumberdaya ekonomi.

Montgomery and Toto Sugito, 1989, Changes in The Structure of Farms and Farmin in Indonesia between Cencues, 1963-1973: The Issues of Inequality and Ner-Landless, *Journal of Shoutheast Asian Studies*, 1980, 351.

Pada dasawarsa 1990-an arus migrasi dari Kemiri ke daerah lain semakin meningkat tajam. Sementara, warga miskin yang masih bertahan di desa dan menggantungkan hidupnya dari pengelolaan lahan pertanian berupa sawah dan tegal yang luasnya hanya sepetak dua petak, semakin tidak berdaya mengelola lahan pertaniannya. Petani kecil dihadapkan pada biaya pengelolaan lahan, harga pupuk yang kian tak terjangkau, dan pada saat bersamaan, harga hasil pertanian, ladang dan perkebunan rakyat, sangat rendah. Kuasa modal dan kuasa pasar yang tercipta dari rahim modernisasi dan globalisasi yang termanifestasikan dalam program modernisasi pertanian tidak banyak menolong warga miskin, sebaliknya justru semakin menjerumuskan mereka ke dalam struktur kemiskinan absolut.

Mempertahankan Hak Atas Kelangsungan Hidup: Ragam Siasat Lokal Perempuan Kemiri

Fenomena yang dijumpai di lapangan menunjukkan bahwa kaum perempuan yang ditinggal migrasi lelakinya tetap tegar menjalani kehidupan meski dengan beban berat yang ada di pundaknya. Perempuan miskin Kemiri yang ditinggal migrasi lelakinya rata-rata memang tidak hidup sendiri. Mereka hidup bersama anak-anaknya dan ditemani oleh salah satu anggota keluarga atau saudaranya, biasanya nenek, bibi, dan/atau mertua. Tetapi ada pula yang hidup sendirian hanya bersama anak-anaknya karena sudah tidak memiliki anggota keluarga dekat, karena pisah dari orang tua dan mertua. Meski lelakinya (baca:suami) bekerja di luar daerah, kaum perempuan tidak lantas dapat menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari dari hasil pekerjaan suami di rantauan.[12] Melalui keterbatasan kuasa *(power)* yang dimiliki, kaum perempuan tetap merespon kemiskinan yang membelenggu hidupnya dengan tindakan-tindakan konstruktif. Mereka dipaksa untuk tidak tinggal diam, melainkan bekerja keras dengan memanfaatkan lapangan pekerjaan yang masih tersisa di pedesaan, meskipun tidak pasti ada setiap hari. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai buruh tani, buruh perkebunan musiman, mencari kayu bakar dan

[12] Menurut pengakuan beberapa perempuan yang ditinggal suaminya merantau, kiriman suaminya tidak pernah bisa mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Ironisnya lagi, tidak mesti setiap bulan suaminya mampu mengirimkan uang, kadang dua bulan sekali, bahkan tidak jarang tiga bulan sampai lima bulan sekali. Rata-rata suami hanya bisa mengirimkan uang setiap dua bulan sekali sebesar Rp. 500.000,- sampai Rp. 1.000.000,-

menjualnya, dan kerja serabutan lainnya. Mengingat tidak ada pemasukan pasti tiap harinya, kaum perempuan menggantungkan hutang-piutang antar sesama saudara atau tetangga terdekat. Dengan aksi-aksi itulah, kaum perempuan miskin Kemiri berusaha menjawab problema kemiskinan yang membelenggu kehidupan keluarganya.

Dengan demikian, kaum perempuan yang ditinggal migrasi suami harus memainkan peran dengan beban ganda, tidak hanya menjadi istri yang mengurusi pekerjaan domestik rumah tangga, tetapi sekaligus juga menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup anggota keluarganya. Karena itu, dalam kondisi seperti apapun, misalnya hamil ataupun sakit, kaum perempuan akan tetap bekerja keras baik di sektor domestik maupun non-domestik.[13] Fenomena di atas menggambarkan apa yang disebut, meminjam istilah James Scott, eksploitasi diri *(self exploitation)*. Setelah ditinggal migrasi, praktis pengelolaan lahan pertanian dilakukan sendiri oleh kaum perempuan dengan tetap melibatkan peran anggota keluarga. Mulai dari urusan mempersiapkan lahan pra tanam, menanami lahan, mengurusi soal air, pupuk, obat-obatan pertanian, hingga pengelolaan hasil pertanian pasca panen, semuanya dilakukan oleh kaum perempuan.

Dalam kapasitasnya sebagai *wong cilik* yang hidup di lingkungan agraris, kerja keras mereka pun tidak jauh dari sektor-sektor pekerjaan yang tersedia di pedesaan. Sebagian dari mereka, terutama yang masih memiliki lahan garap, mengelola lahan garap *(land operation)* yang dimilikinya sebagai sumber utama ekonomi rumah tangga. Bagi kaum perempuan yang tinggal di dataran atas dan tengah pedesaan dengan kondisi ekologi sosial berupa lahan kering (*tegal*) memanfaatkan lahan untuk ditanami aneka tanaman subsisten dan sekaligus bercorak ekonomi pasar dengan jenis utama antara lain jagung, singkong, kopi, serta beberapa tanaman subtropis lainnya. Sedangkan, mereka yang tinggal di dataran rendah dengan kondisi lahan basah (sawah) menanami lahannya dengan jenis tanaman meliputi padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan, dan semacamnya. Meski secara teoritis usaha tani kecil itu banyak dipandang kurang efisien dan produktif, tetapi bagi perempuan petani kecil hal itu merupakan salah satu cara penting untuk

[13] Apa yang dialami Bu As, misalnya, adalah salah satu contoh bagaimana perempuan yang ditinggal suaminya migrasi ke Bali dalam kondisi hamil tetap bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja sebagai buruh perkebunan.

mempertahankan hidup,[14] atau lebih dikenal dengan sebutan strategi *survival*, beberapa ahli ada yang menyebut sebagai *Copping Mechanism*.[15]

Mengingat area lahan yang dimiliki keluarga miskin tidak begitu luas, pengelolaan lahan pertanian, baik lahan basah maupun lahan kering, bisa dilakukan kaum perempuan. Tetapi semua itu tetap melibatkan bantuan tenaga yang berasal dari kerabat dekat, keluarga dan tetangga, baik dari kalangan sesama kaum perempuan maupun laki-laki yang kebetulan tidak migrasi. Ada juga sebagian dari kaum perempuan yang memilih menyewakan lahan dengan sistem sewa *gadai*, atau menggarapkan pengelolaan lahan pertaniannya kepada orang lain dengan sistem bagi hasil. Bagi kaum perempuan yang memilih menyewakan lahan garap daripada mengelolanya sendiri biasanya didasarkan pada pertimbangan tingginya biaya pengelolaan, sementara hasil pertanian yang diperolehnya kerap tidak sebanding dengan modal yang telah dikeluarkan. Bagi sebagian kaum perempuan yang memilih mempertahankan pengelolaan lahan garapnya sendiri, mereka harus siap menanggung tuntutan kebutuhan biaya pengelolaan yang tidak kecil.

Mengingat kaum perempuan tidak memiliki cadangan dana cukup, banyak di antara mereka kemudian terlibat dalam jaringan hutang, tidak saja hutang antar sesama keluarga, kerabat atau tetangga, melainkan hutang dengan tuan tanah atau

---

[14] Menurut Gunawan Wiradi sekalipun usaha pertanian di Indonesia sebagian besar diusahakan dalam usaha tani skala kecil, namun usaha tani kecil ini ternyata dapat merupakan suatu kesatuan kerja ekonomi yang tegar. Kenyataannya dalam usaha tani kecil, keluaran *(out put)* tiap satuan luas lahan garapan dan tiap satuan modal, seringkali lebih tinggi daripada petani menengah dan besar. Memang benar dilihat dari segi efisiensi dan produktivitas, usaha tani kecil tidaklah sebaik usaha tani menengah apalagi besar. Namun bagi petani itu sendiri usaha tani kecil tetap merupakan satu kesatuan kerja ekonomi yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Karenanya, usaha tani kecil meskipun secara teoritis kurang efisien dan produktif, tetap saja ia merupakan salah satu strategi penting dalam mempertahankan kelangsungan hidup petani kecil. Baca Puji Suharso, *Tanah, Petani, Politik Pedesaan*, (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2002), 28.

[15] Breman menyatakan bahwa yang disebut strategi *survival* adalah *the activities of poor people in time of stress which they see as crucial for the continued running of their household*. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa yang dimaksud aktivitas di sini adalah aktivitas utama yang diusahakan di luar "ekonomi formal". Sementara itu, Toni Beck menyatakan bahwa bahwa aktivitas petani miskin sebagai strategi *survival* pada dasarnya dapat dikategorikan ke dalam dua hal, yaitu: aktivitas di sektor pertanian dan aktivitas diluar sektor pertanian *(off farm activities)*. Puji Suharso, *Tanah, Petani, Politik Pedesaan*, halaman: 63.

pemilik modal (rentenir). Sebagai kompensasinya, hasil pertanian terutama padi, jagung dan kopi saat panen langsung dijual ke pengepul atau pemilik modal dengan standar harga yang mereka tetapkan secara sepihak. Sementara itu, bagi kaum perempuan dari keluarga miskin di Kemiri yang sama sekali atau hampir tidak punya lahan garap juga memiliki ketergantungan dengan tanah baik pertanian ataupun perkebunan. Penting dicatat bahwa jumlah perempuan tuna lahan bisa mencapai 60 persen.[16] Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka melakukan kerja keras baik di sektor pertanian menjadi petani pekerja atau buruh tani, petani perkebunan atau buruh perkebunan, petani penggarap,[17] maupun di luar sektor pertanian seperti menjadi buruh di dunia industri pedesaan, tukang dan kuli bangunan, pedagang *kelontong*, buruh/ pembantu rumah tangga, dan berbagai kerja di lapangan *off farm activities*.[18] Sebagai gambaran, warga Kemiri yang masuk kategori pemilik tanah sawah hanya berjumlah 242 orang, pemilik tegalan berjumlah 106 orang, penyewa/penggarap sebanyak 78 orang, dan buruh tani dan di luar pertanian berjumlah 5.615 orang.[19]

Sekilas kaum perempuan yang bekerja sebagai buruh di perkebunan, kondisinya terlihat lebih baik dibandingkan mereka yang bekerja serabutan. Paling tidak dalam sebulan, hampir bisa dipastikan, ada pekerjaan di perkebunan milik PDP, PTP, atau swasta (P.T. J.A. Watti). Dengan kerjaan yang hampir pasti setiap bulannya, maka ada pemasukan *(in come)* yang pasti pula yang dapat digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan hidup keluarga. Nasib lebih tragis dialami kaum perempuan yang menggantungkan hidupnya dari kerja serabutan, yang hasil jerih payahnya belum pasti menghasilkan upah atau pendapatan.

---

[16] Meski belum dilakukan survei mendalam dengan pendekatan kuantitatif, namun berdasar pada jejaring informasi dari warga di setiap dusun diperoleh informasi yang mengungkapkan hal itu.

[17] Meski tidak banyak, namun ada sebagian kaum perempuan yang menginvestasikan sebagian uang kiriman suami untuk menyewa lahan garap untuk dikelola. Hal ini selaras dengan pendapat yang mengatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki tanah secara formal dapat mempunyai dan memanfaatkan hak garap yang dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti sewa menyewa, gadai, atau melalui sistem bagi hasil. Puji Suharso, *Tanah, Petani, Politik Pedesaan*, (Yogyakarta: Pondok Edukasi, 2002), 54.

[18] *Ibid.*, 65.

[19] Monografi Desa Kemiri, 7.

Di Kemiri sebenarnya hampir tidak ada warga desa yang menjadi tuan tanah dengan aset kepemilikan dan penguasaan lahan garap yang sangat luas. Warga Kemiri yang masuk kategori kaya (tuan tanah) dilihat dari aspek kepemilikan dan penguasaan lahan, hanya berkisar dua sampai tiga orang saja, itupun dengan kepemilikan tanah hanya seluas 2 hektar sampai 3.5 hektar. Dilihat dari aspek penguasaan tanah,[20] maka yang lebih tepat dikatakan sebagai kelompok sosial kaya atau tuan tanah tidak lain adalah pihak pengelola lahan perkebunan (1.050 ha) dan pengelola lahan kehutanan (perhutani) (1.578.584 ha).

Satu titik persamaan yang dialami oleh perempuan miskin dengan kapasitas kepemilikan/penguasaan lahan sempit dan tuna lahan garap dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga kelangsungan hidup keluarga adalah bahwa mereka sama-sama tidak sekedar menggantungkan satu sektor usaha saja. Bagi perempuan petani kecil, di samping bekerja mengelola lahan pertanian, mereka juga melakukan pekerjaan tambahan terutama di sektor *off farm activities*. Tidak jauh beda dengan perempuan miskin tuna lahan, mereka juga melakukan kerja ganda. Di ranah non-domestik, mereka melakukan kerja ganda, pagi bekerja sebagai buruh tani atau perkebunan, siang dan sore harinya bekerja serabutan atau kerja sebagai buruh rumah tangga. Biasanya, kaum perempuan membuat distribusi peran terhadap anggota keluarga yang masih tinggal di desa, ada yang diberi tugas bekerja di sektor pertanian dan ada pula yang diberi peran bekerja di luar sektor pertanian. Di samping itu, kaum perempuan juga melakukan gerakan kecil-kecilan seperti mengambil kayu bakar atau kayu olahan dari hutan yang dikelola perhutani, mengambil sebagian hasil perkebunan seperti kopi dari perkebunan milik PTP, PDP dan P.T. J.A. Watti, bahkan melalui salah satu anggota keluarganya yang laki-laki, kaum perempuan terlibat pula dalam penebangan pohon di hutan untuk dijual ke penadah. Terjadinya peristiwa banjir bandang yang meluluhlantakkan sebagian kawasan Kemiri lantas memunculkan berbagai wacana stereotif terutama yang dibangun oleh pihak penguasa bahwa sebab terjadinya banjir dikarenakan pembabatan hutan oleh warga masyarakat desa Kemiri.

---

[20] *Ibid.*, 54. Di pedesaan struktur kelas petani sebenarnya tidak hanya ditentukan secara tunggal oleh pemilik tanah, namun harus pula dipikirkan dan dianalisis mengenai penguasaan tanah. Hart (1989) dan Wolf (1986) bahkan memberikan argumentasi bahwa struktur kelas petani lebih penting dilihat dari aspek penguasaan tanah *(land controled)* dan aspek luas tanah garapan *(land operated)*, bukan sekedar aspek pemilikan tanah *(land owned)* semata.

Menilik gerakan kecil yang dilakukan kaum perempuan miskin, tidak disangsikan, bahwa telah terjadi perlawanan baik secara simbolik, kultural, maupun sosial sebagai strategi yang mereka pergunakan untuk melakukan *counter* atau, meminjam istilah Scott, aksi protes terhadap berbagai hal yang dipromosikan oleh kalangan suprastruktur.[21] Dan yang terpenting lagi, aksi kecil yang dilakukan kaum perempuan Kemiri tersebut sekaligus berfungsi sebagai senjata untuk mempertahankan kelangsungan hidup di tengah kekuatan dominan yang serba represif.

Perempuan, Kerja, dan Negosiasi Kesetaraan

Setiap hari perempuan miskin Kemiri senantiasa terlibat dalam aktivitas kerja keras, baik di ranah domestik maupun non-domestik. Bagi mereka, kerja yang dilakukannya mulai pagi sampai malam hari, dapat dibilang sebagai hal biasa, rutinitas, dan bahkan sebuah kelaziman. Karena memang sejak kecil mereka sudah terbiasa karena memang dibiasakan oleh orang tuanya untuk bekerja. Terlahir di lingkungan keluarga miskin, setiap hari mereka senantiasa berhadapan dengan kesulitan hidup. Kondisi demikian tidak banyak memberikan ruang pilihan bagi mereka, kecuali harus terlibat dalam kerja keras, bahkan sejak usia dini. Tidak banyak kesempatan bagi mereka untuk bermain menikmati masa kanak-kanak. Saat usia baru menginjak *aqil baligh*, setamat SMP dan sebagian tamat SMA, mereka dihadapkan pada tuntutan perkawinan atau pernikahan. Dalam tradisi Madura, pernikahan usia muda merupakan bagian dari budaya.[22]

---

[21] Hery Santoso, *Perlawanan di Simpang Jalan, Kontes Harian di Desa-desa Sekitar Hutan*, (Yogyakarta: Damar, 2004), 301.

[22] Ada kekhawatiran orang tua apabila anak-anak perempuannya tidak segera menikah (mendapatkan jodoh) ditakutkan akan menjadi perawan tua, dan itu semua akan membawa sebuah konsekuensi sosial berupa perasaan malu. Jadi, perkawinan usia muda bagi warga Kemiri terutama di bagian atas yang mayoritas Madura, bukan semata-mata terkait dengan ketidakmampuan orang tua dalam menyekolahkan anak ke jenjang lebih tinggi, melainkan terkait pula dengan persoalan tradisi. Di samping itu, ada pandangan tradisional dari orang tua, yang menilai pendidikan bagi anak perempuan dipandang tidak terlalu penting dibandingkan dengan anak laki-laki. Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau nantinya anak perempuan, ujung-ujungnya, *toh* akan segera menikah dengan laki-laki yang akan menafkahinya, demikian salah seorang ibu muda menegaskan pandangannya.

Setelah menikah, kaum perempuan ternyata dihadapkan pada kondisi kehidupan yang tidak jauh beda dengan kehidupan yang dilakoninya saat bersama orang tua mereka. Sebuah kondisi kehidupan serba kekurangan (baca: miskin) yang, sekali lagi, menuntut mereka untuk terlibat penuh dalam kerja keras. Justru saat menikahlah, kaum perempuan semakin memikul beban keluarga bertambah berat. Sebagai istri, ia harus bertanggung jawab terhadap persoalan rumah tangga, mengurusi anak-anak dan suami, serta keberlangsungan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Perempuan sendiri memiliki kesadaran bahwa kerja yang mereka lakukan di lingkungan domestik (mengurusi rumah, anak-anak, dan suami) merupakan kewajiban perempuan. Demikian pula kaitannya dengan kerja non-domestik yang dilakukannya, kaum perempuan juga memandangnya sebagai kewajiban yang harus mereka lakukan untuk membantu suami dalam memikul beban keluarga. Ajaran agama sendiri ataupun *wejangan* (nasehat) orang tua, menurut pengetahuan yang diterima kaum perempuan, mengajarkan bahwa sebagai istri, kaum perempuan harus bisa membahagiakan suami, dengan cara tunduk, patuh, menghormati dan melayani keperluan suami.[23]

Beban semakin berat manakala kaum perempuan memainkan peran sebagai kepala rumah tangga karena ditinggal migrasi suaminya. Dalam kondisi seperti itu, kaum perempuanlah yang kemudian secara langsung bertanggung jawab terhadap nasib kehidupan keluarganya. Karenanya tidak heran jika kaum perempuan lantas terlibat penuh dalam kerja baik domestik maupun non-domestik yang lebih berat. Sebagaimana telah diulas panjang lebar di atas, meski tekanan hidup sangat berat akibat sistem sosial ekonomi yang tidak memiliki keberpihakan kepada *wong cilik*, kaum perempuan tidak lantas menjadi tidak berdaya *(powerless)* sama sekali tanpa banyak melakukan tindakan subkultur yang berarti. Melalui keterbatasan kuasa feminisme yang dimilikinya, kaum perempuan ternyata mampu melakukan gerakan-gerakan subkultur, kerap bersifat personal, tidak sistematis, dan bertujuan jangka pendek (pemenuhan materi sehari-hari), untuk dapat menyelamatkan kelangsungan hidup keluarga. Melalui aksi kecil-kecilan yang terkadang dinilai ilegal

[23] Pemahaman semacam itu dibenarkan pula oleh kaum laki-laki, menurutnya memang seperti itulah tugas dan kewajiban kaum perempuan. Dalam kasus semacam ini, terlihat betul betapa agama dan pengetahuan tradisional memiliki, meminjam istilah Foucault, relasi kuasa yang gilirannya menempatkan kaum laki-laki sebagai ordinat dibandingkan kaum perempuan yang menjadi subordinat.

oleh kaum suprastruktur, kaum perempuan mampu mempertahankan hak atas kelangsungan hidup keluarga. Pergulatan keseharian yang dialami kaum perempuan, kerja yang mereka lakukan, dan berbagai aksi kecil-kecilan yang dibangunnya itu, disadari atau tidak, telah memunculkan semacam redefinisi pada diri mereka dalam memandang diri sendiri relasinya dengan keluarga, masyarakat, kelompok sosial lain, kerja yang dilakukannya, dan bahkan negara. Sebagai contoh, ketika kaum perempuan yang tinggal di sekitar perkebunan tidak mendapatkan akses pekerjaan atau kalaupun bekerja di perkebunan dengan gaji yang rendah, maka mereka memilih tidak banyak melakukan protes atau gerakan radikal, melainkan lebih mengedepankan politik akomodasi dengan cara memanfaatkan sebagian lahan yang ada di sekitarnya, milik perkebunan atau tuan tanah, untuk ditanami bahan makanan, mengambil sebagian kecil hasil perkebunan milik PDP dan P.T. J.A Watti seperti kopi untuk dikonsumsi keluarga manakala kehabisan kopi, atau dijual manakala butuh uang. Ini semua dapat dipandang sebagai bentuk-bentuk reproduksi ekonomi baru yang dirancang kaum perempuan sebagai senjata untuk melakukan resistensi terhadap pihak penguasa perkebunan, dan sekaligus sebagai strategi untuk memperoleh sumberdaya ekonomi guna memenuhi kebutuhan keluarga.

Meski kaum perempuan memiliki pemahaman bahwa kerja yang mereka lakukan baik di ranah keluarga maupun di luar rumah sebagai bentuk kewajiban kaum perempuan dalam membantu suami, namun secara simbolik mereka juga berusaha membangun negosiasi dengan suaminya untuk mengakui eksistensi kerja yang dilakukannya bukan sebagai kerja sampingan, atau pelengkap saja. Sebab, kerja yang dilakukan kaum laki-laki di daerah migran tidak bisa sepenuhnya mencukupi kebutuhan keluarga. Setidaknya pengakuan semacam itu dikemukakan para informan seperti Bu As, dan Bu Ilmiyati yang dengan penuh kepolosan mengungkapkan: *"Ya kepingin Mas, kerja yang kita lakukan ini dihargai oleh suami, kerja mengurusi rumah tidak lagi dipandang sebagai kewajiban perempuan semata, tetapi kewajiban suami juga. Kerja serabutan di luar rumah meskipun tidak selalu menghasilkan upah dalam bentuk uang juga dilihat bukan sebatas kerja sampingan, melainkan kerja betulan sebagaimana kerja yang dilakukan suami"*.

Apabila dicermati, terlihat betapa ranah lokal sebagai tempat pergerakan kaum perempuan seperti rumah tangga, dunia kerja di sektor informal pedesaan, kelompok pengajian *muslimatan*, dan aneka ruang gerak sosial lokal di pedesaan Kemiri, menjadi arena kontestasi bagi kaum perempuan untuk membangun

identitasnya dan sekaligus melakukan negosiasi kesetaraan dengan kaum laki-laki. Walaupun belum terjadi perubahan mendasar, terutama perubahan pada tataran ideologi dan struktur, namun aksi-aksi kecil yang dilakukan kaum perempuan dengan memanfaatkan arena kontestasi lokal-tradisional tersebut secara simbolik telah melahirkan wacana tandingan *(counter discourse)* dalam melakukan resistensi terhadap kemapanan ideologi dan struktur sosial patriarkhis yang ada di sekitarnya. Dengan bekal kerja keras yang dilakukan, kaum perempuan memiliki modal keberanian lebih untuk bersuara atau melakukan protes apabila suaminya menyudutkan dirinya atas persoalan atau kesalahan dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, kaum perempuan Kemiri cenderung memilih pendekatan politik akomodasi dalam membangun relasi, komunikasi dan negosiasi dengan kaum laki-laki, terutama di ranah kehidupan keluarga. Melalui pendekatan semacam ini, sekilas menempatkan kaum perempuan tetap pada posisinya yang subordinat, karena memang dalam banyak hal yang sesungguhnya merugikan kaum perempuan, mereka tetap saja memikulnya. Tetapi, justru dengan pendekatan keluwesan ini, dan bukan pendekatan yang radikal, kaum perempuan tetap mampu menjaga kelangsungan hidup keluarga bersama suami dan anak-anaknya.

Penutup

Fenomena migrasi mengisyaratkan kompleksitas persoalan kemiskinan yang melanda desa Kemiri. Terutama bagi kaum perempuan yang ditinggal migrasi